

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI DAN
USAHA MIKRO KABUPATEN MALANG
NOMOR: 188.4/ /KEP/35.07.112/2017
TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA DINAS
KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN
MALANG TAHUN 2018

**RENCANA KERJA
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN MALANG
TAHUN 2018**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa setiap PD berkewajiban menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah. Salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah adalah Rencana Kerja (Renja) PD yang merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) PD dokumen rencana kerja pemerintah lima tahunan, yang juga dijadikan sebagai tolak ukur penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan sebagai dasar pertanggungjawaban Kepala Daerah.

Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa keterpaduan pola perencanaan pembangunan daerah menjadi poin yang penting dalam siklus penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga rencana pembangunan daerah juga wajib memperhatikan 10

(sepuluh) Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai wujud prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Renja adalah rancangan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing PD dalam waktu 1 (satu) tahun sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam rangka menunjang visi dan misi Kepala Daerah. Program dan kegiatan dalam renja PD akan diselaraskan dengan program dan kegiatan prioritas daerah.

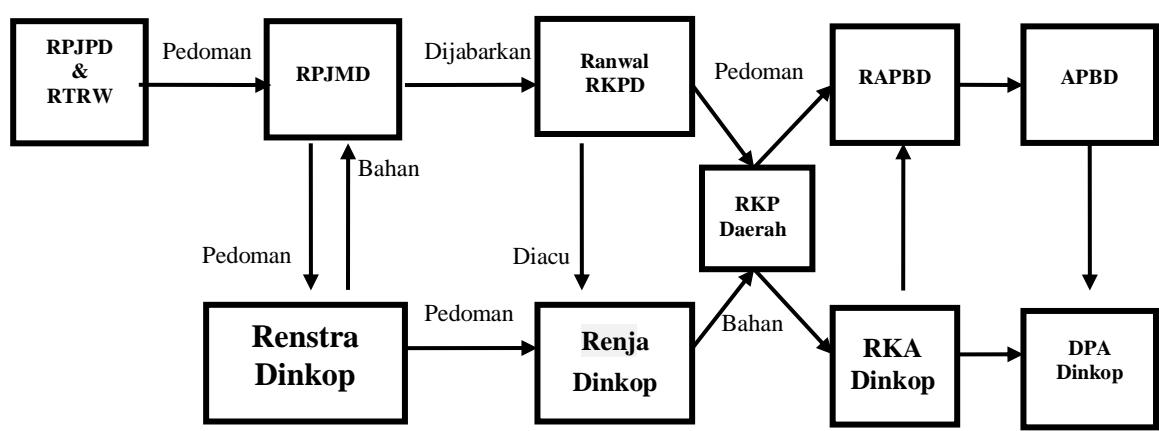
Proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang disesuaikan dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang tahun 2016 - 2021 dan tidak menyimpang dari RKPD tahun 2018 serta RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016 - 2021. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah (PD) memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Keterkaitan Seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah. Sebagai bahan masukan penyusunan rancangan RPJMD adalah Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD). Selanjutnya setelah RPJMD disahkan maka menjadi acuan penyusunan Renstra-PD. RPJMD dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan.

RKPD digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Berkaitan dengan itu, maka RKPD merupakan pedoman awal untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berkenaan. Dengan mengacu pada RKPD Kabupaten Malang Tahun 2017 yang tertuang dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 15 Tahun 2016, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro selaku Perangkat Daerah (PD) juga berkewajiban menyusun Rencana Kerja (Renja) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.

Renja merupakan penjabaran dari Renstra, dan dalam penyusunannya mengacu pada Rancangan awal RKPD. Renja juga sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah (PD). RKA dimaksud selanjutnya menjadi salah satu acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah (PD). Renja juga perlu mengakomodir hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Forum Satuan Kerja Pemerintah Daerah, pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan kebijakan pemerintah pusat/Provinsi Jawa Timur.

KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN



Penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Daerah tahun 2018 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang tahun 2018 dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Daerah Tahun 2016-2021, yang tentunya mendukung Visi dan Misi Bupati Malang sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.

Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro berisi program dan kegiatan, indikator kinerja, target capaian program dan kegiatan, pendanaan indikatif, evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya dan prakiraan maju. Dalam penyusunan Rencana Kerja maka ada beberapa hal yang dilakukan yaitu pengolahan data, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, review terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah, perumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan.

Selanjutnya Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro tahun 2018 ini akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro tahun 2018, serta menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama tahun 2018 dan selanjutnya akan dievaluasi melalui penilaian terhadap realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, dan penyerapan anggaran.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang tahun 2016-2021, maka Dinas Koperasi dan Usaha Mikro berperan dalam mendukung Misi ke 3 Bupati Malang yaitu Melakukan percepatan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi guna meningkatkan indeks pembangunan manusia dan misi ke 4 Bupati Malang yaitu Mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, pariwisata, dan industri kreatif dengan tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat. Hal tersebut berkaitan dengan Tujuan Kementerian Koperasi dan UKM pada Renja Kementerian Koperasi dan UKM 2018 yaitu Mewujudkan Koperasi dan UMKM yang berdaya saing dan berkontribusi pada peningkatan perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat berlandaskan semangat wirausaha, kemandirian koperasi dan keterpaduan. Dan juga berkaitan dengan misi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur yaitu Memberdayakan Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, memperluas kesempatan kerja dan menurunkan jumlah kemiskinan dalam rangka mewujudkan Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang Tahun 2017 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 35 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
24. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang;
25. Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 Atas Penyesuaian Nomenklatur Program Prioritas Perangkat Daerah;
26. Peraturan Bupati Malang Nomor 45 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2018.

Tujuan menciptakan dan sinergitas perencanaan program kegiatan pembangunan selama tahun 2018 serta mewujudkan efisiensi dan evektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

1.4. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penyusunan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERENGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan capaian Rencana Strategis PD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
PERANGKAT DAERAH (PD) TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya, hal ini adalah sebagai tolak ukur capaian kinerja pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang Dalam penyusunan program dan kegiatan telah ditetapkan indikator kinerja program (*outcome*) dan kegiatan (*output*) serta target kinerja capaian program/kegiatan maupun realisasi.

Tahun 2017 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro melaksanakan 10 program dan 39 kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut dialokasikan sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Sesuai dengan realisasi anggaran program/kegiatan yang telah ditetapkan sampai triwulan kedua tahun 2017 dapat terealisasi rata-rata 36,88%. Tingkat realisasi penyerapan anggaran tertinggi pada triwulan ke dua tahun 2017 pada program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif sebesar 48,02% karena program tersebut sudah dilaksanakan pada Triwulan I dan triwulan II, sedangkan Tingkat realisasi penyerapan anggaran terendah pada triwulan ke dua tahun 2017 pada program Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi sebesar 16,60% karena program tersebut ada sebagian yang belum dilaksanakan. Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan tingkat capaian Rencana Strategis dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi hasil evaluasi hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d 2017
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 (AKHIR PERIODE RENSTRA)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2015	TARGET & REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2016			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PD) TAHUN 2017	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN 2017 (TAHUN BERJALAN)	
					TARGET RENJA PD TAHUN 2016	REALISASI RENJA PD TAHUN 2016	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN	TINGKAT CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 (5+7+9)	11=(10/4)
	Urusan Wajib									
I.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100 %	-	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	26.750 Buah	-	4.250 buah	4.281 surat	100,7	4.500 buah	8.781 buah	32,8
2	Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	72 Bulan	-	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	24 Bulan	33,3

3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	722 OB	-	132 OB	132 OB	100	118 OB	250 OB	34,7
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	216 OB	-	36 OB	36 OB	100	36 OB	72 OB	33,3
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	282 jenis	-	47 Jenis	47 Jenis	100	47 Jenis	94 Jenis	33,3
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	85 jenis	-	14 Jenis	14 Jenis	100	15 Jenis	29 Jenis	34,1
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	59 Jenis	-	9 Jenis	9 Jenis	100	10 Jenis	19 Jenis	32,2
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	6 jenis	-	1 Jenis	1 Jenis	100	1 Jenis	2 Jenis	33,3
9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)	12 Jenis	-	2 Jenis	2 Jenis	100	2 Jenis	4 Jenis	33,3
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	29.419 HOK	-	3471 HOK	3471 HOK	100	5001 HOK	8.472 HOK	28,7
11	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	236 HOK	-	42 HOK	42 HOK	100	35 HOK	77 HOK	32,6
12	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	1.692 HOK	-	295 HOK	295 HOK	100	267 HOK	562 HOK	33,2

II.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100 %	-	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100
13	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 Baru yang diadakan (Unit)	5 Unit	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 Baru yang diadakan (Unit)	4 Unit	-	-	-	-	1 Unit	1 Unit	25
14	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan(jenis)	6 Jenis	-	-	-	-	2 Jenis	2 Jenis	33,3
15	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	21 Jenis	-	-	-	-	4 Jenis	4 Jenis	19
16	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mebeleur yang diadakan (jenis)	3 Jenis	-	-	-	-	-	-	-
17	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	262 Jenis	-	30 Jenis	30 Jenis	100	27 Jenis	57 Jenis	21,7
18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	144 Unit	-	24 Unit	24 Unit	100	24 Unit	48 Unit	33,3
19	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	30 Jenis	-	5 Jenis	5 Jenis	100	5 Jenis	10 Jenis	33,3
20	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah Mebeleur yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	4 Jenis	-	-	-	-	1 Jenis	1 Jenis	25

III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100 %	-	-	-	-	100 %	100 %	100
21	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah Mesin/Kartu Absensi yang diadakan (unit)	3 Unit	-	-	-	-	1 Unit	1 Unit	33,3
22	Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga (Stel)	261 Stel	-	-	-	-	53 Stel	53 Stel	20,3
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100 %	-	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100
23	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparat yang mengikuti diklat formal	55 orang	-	13 Orang	13 Orang	100	11 orang	24 orang	43,6
V	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100 %	-	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100
24	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	Jumlah Dokumen SAKIP (Buku)	6 Buku	-	1 Buku	1 Buku	100	1 Buku	2 Buku	33,3
		Jumlah Laporan Tahunan (Buku)	4 Buku	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen Renstra (Buku)	4 Buku	-	-	-	-	-	-	-

		Jumlah Dokumen Renja (Buku)	4 Buku	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Laporan Kinerja SKPD Triwulanan (I s/d III) (Buku)	4 Buku	-	-	-	-	-	-	-
25	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	6 Buku	-	1 Buku	1 Buku	100	1 Buku	2 Buku	33,3
VI	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Persentase fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah untuk kemudahan pelayanan bagi KUMKM	100 %	-	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100
26	Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah	Jumlah Koperasi yang diberikan sosialisasi dan yang dievaluasi tentang optimalisasi aset-aset Koperasi	54 kop/KUD	-	27 kop/KUD	27 kop/KUD	100	27 kop/KUD	54 kop/KUD	100
27	Penguatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Bagi Tenaga Kerja Industri Hasil Tembakau	Jumlah peserta pelatihan bagi tenaga kerja industri hasil tembakau	1.200 Orang	-	1.200 Orang	1.200 Orang	100	-	1.200 Orang	100
VII	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Persentase SDM KUMKM dalam pengembagn kewirausahaan dan peningkatan ketrampilan	100 %	-	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100

28	Memfasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah Koperasi yang diberikan bimbingan teknis pengembangan kemitraan usaha sektor riil dan temu usaha pengembangan jaringan usaha Koperasi	70 Kop	-	70 koperasi	70 koperasi	100	70 Kop	140 koperasi	100
29	Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau	jumlah orang yang diberikan pelatihan ketrampilan kerja	5.300 Orang	-	2.800 orang	2.800 orang	100	2.500 Orang	5.300 orang	100
VIII	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Persentase pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah	100 %	-	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100
30	Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan	Jumlah Koperasi yang diberikan sosialisasi peningkatan akses pembiayaan Koperasi	90 Koperasi Wanita	-	-	-	-	90 Koperasi Wanita	90 Koperasi Wanita	100
31	Koordinasi Pemanfaatan Fasilitas Pemerintah untuk Usaha Kecil Menengah dan Koperasi	Jumlah Koperasi penerima dana hibah pemerintah yang diberikan fasilitasi pembinaan	400 Kopwan/Kopkar/KSPPS/Koppontren	-	200 Kopwan/Kopkar/KSPPS/Koppontren	200 Kopwan/Kopkar/KSPPS/Koppontren	100	200 Kopwan/Kopkar/KSPPS/Koppontren	200 Kopwan/Kopkar/KSPPS/Koppontren	100
32	Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pusat Layanan Usaha Terpadu-Koperasi dan UMKM (PLUT-KUMKM) yang diadakan	47 jenis	-	-	-	-	47 jenis	47 jenis	100

		Jumlah KUMKM yang difasilitasi Promosi dan Pameran	75 KUMKM	-	75 KUMKM	75 KUMKM	100	-	75 KUMKM	100
33	Penyelenggaraan Pembinaan Industri Rumah Tangga, Industri Kecil dan Industri Menengah	Jumlah KUMKM yang diberikan layanan berupa Fasilitasi, Konsultasi dan Advokasi pada KUMKM terhadap Permasalahan yang dihadapi (Permodalan, Pemasaran, TTG dan Peningkatan SDM UMKM)	300 Orang	-	300 Orang	300 Orang	100	-	300 Orang	100
		Jumlah UMKM yang difasilitasi promosi produk UMKM Tingkat Kabupaten dan Tingkat Provinsi	100 UMKM	-	-	-	-	100 UMKM	100 UMKM	100
34	Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah KUMKM yang difasilitasi Kegiatan Promosi Produk KUMKM yang dipamerkan di luar daerah provinsi dan di tingkat nasional.	11 KUMKM	-	6 KUMKM	6 KUMKM	100	5 KUMKM	11 KUMKM	100
35	Pengembangan Kebijakan dan Program Peningkatan Ekonomi Lokal	Jumlah Peserta pelatihan pengembangan usaha retail dan pelatihan pengembangan usaha PKL	70 Koperasi dan 150 Orang	-	70 Koperasi	70 Koperasi	100	150 orang	70 Koperasi dan 150 Orang	100

36	Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penggunaan Dana Pemerintah bagi Koperasi	Jumlah Koperasi beranggota Pelaku UMKM penerima dana pemerintah yang dimonitoring dan dievaluasi	70 Koperasi	-	35 Koperasi	35 Koperasi	100	35 Koperasi	70 Koperasi	100
IX	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase peningkatan pemahaman tentang pengelolaan koperasi dan pengawasan koperasi	100 %	-	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100
37	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Jumlah Peserta bimbingan teknis pengendalian dan pengawasan bagi pengawas koperasi wanita	290 Kopwan	-	150 Kopwan	150 Kopwan	100	140 Kopwan	290 Kopwan	100
38	Sosialisasi Prinsip-Prinsip Pemahaman Perkoperasian	Jumlah Koperasi (Pengurus, Pengawas dan anggota Koperasi) yang diberikan bimbingan teknis perkoperasian dan Kelompok Ekonomi Produktif yang diberikan sosialisasi KEP	97 KSPPS, 35 Koperasi dan 10 KEP 15 KEP	-	5 KEP	5 KEP	100	97 KSPPS, 35 Koperasi dan 10 KEP	97 KSPPS, 35 Koperasi dan 10 KEP 15 KEP	100
39	Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	Jumlah Penilaian terhadap Calon Koperasi Berprestasi	5 Koperasi	-	5 Koperasi	5 Koperasi	100	5 Koperasi	10 Koperasi	100
40	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Koperasi yang dinilai Kesehatannya (Penilaian Kesehatan Koperasi)	360 Kop		180 Kop	180 Kop	100	180 Kop	360 Kop	100

X	Program Peningkatan Pelayanan	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Bantuan Dana Bergulir bagi KUMKM	100 %	-	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100
41	Kegiatan Pendukung Pelayanan	jumlah UMKM dan Koperasi yang diberikan pelayanan Bantuan Dana Bergulir untuk Peningkatan Permodalan	130 KUMKM	-	130 KUMKM	130 KUMKM	100	130 KUMKM	260 KUMKM	100

Dengan melihat Tabel 2.1 dapat dilihat bahwa Dinas Koperasi dan usaha Mikro mempunyai 10 program yang terdiri dari 39 kegiatan dan pada pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2017 pada triwulan ke II (dua) sudah terealisasi rata rata sebesar 36,88 % sehingga Kegiatan tetap berjalan dan dapat dilaksanakan lebih optimal sesuai dengan target, sedangkan untuk target Renstra Tahun 2016 s/d 2021 Pemanfaatan dana tepat sasaran bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) sampai saat ini naik 65 % dari target semula. Program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yang mendukung Pengarus Utamaan Gender meliputi Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan kegiatan Penyelenggaraan Pembinaan Industri Rumah Tangga, Industri Kecil dan Industri Menengah serta Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dengan kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian.

Permasalahan anggaran cukup menjadi kendala tersendiri mengingat ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan/ajuan dari PD, sehubungan dengan hal tersebut pelaksanaan program dan kegiatan akan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Permasalahan lain yang timbul adalah kurangnya kendaraan dinas sebagai sarana transportasi mengingat tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah Dinas Teknis yang melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Malang dengan kegiatan antara lain : koordinasi, konsultasi, pengumpulan data, Penyuluhan dan Pembentukan Koperasi, Pembinaan, evaluasi dan monitoring sehingga mobilitasnya cukup tinggi.

Dengan keterbatasan kendaraan Dinas yaitu : 4 unit kendaraan roda empat, 1 unit untuk Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan 3 Unit mobil operasional, demikian juga kendaraan roda dua ada 23 unit dengan kondisi rusak berat 17 unit diusulkan dihapus, sehingga masih kurang 10 unit kendaraan roda dua, mengingat jangkauan dan pelaksanaan cukup luas dan padat seringkali mengalami kendala, sehingga mengakibatkan tertundanya pelaksanaan kegiatan.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PD

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang pada intinya adalah Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati Malang sesuai bidang tugasnya dan mengolah data sampai dengan melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan. Adapun kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang meliputi:

- a. Sebagai Lembaga yang membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan teknis dibidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- b. Melaksanakan Supremasi Hukum di Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- c. Menumbuh dan Mengembangkan Kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- d. Meningkatkan peran Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- e. Meningkatkan ketrampilan, teknologi proses dan jaringan distribusi serta menyediakan fasilitas konsultasi dan informasi bagi Pengusaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk memperluas akses pasar;
- f. Meningkatkan Akses Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terhadap pemanfaatan sumber daya produktif pada Masyarakat;
- g. Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan melalui Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan;
- h. Mengembangkan Pola Kerjasama Kemitraan yang sinergis dan saling menguntungkan antara Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Perbankan, Swasta, BUMN / BUMD dan Lembaga Keuangan Lainnya;
- i. Mengumpulkan, mengelola dan menganalisa data untuk kebutuhan perencanaan, monitoring dan evaluasi;
- j. Tugas lain yang diberikan oleh Bupati kepada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.

Dalam penyusunan dokumen perencanaan, maka telah dihasilkan dokumen perencanaan utama Kabupaten Malang yaitu:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005–2025, sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang tahun 2016-2021;
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2017, sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017;
4. Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2010-2030 sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.

Pencapaian kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditentukan yaitu sasaran I yaitu Persentase Jumlah Koperasi Aktif dengan target 80% pada tahun 2016 tercapai 92,6% sedangkan sasaran II yaitu persentase pertumbuhan UMKM dengan target 0,50% pada tahun 2016 tercapai 0,52% sehingga program dan kegiatan yang telah dilakukan berjalan dengan baik terutama dengan adanya UPT Pengelola Dana Bergulir, Pusata Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan UMKM dan Griya KUMKM, maka dapat memberi dukungan maupun memberikan fasilitas kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Malang sehingga akan semakin mengalami peningkatan dengan harapan akan berdampak positif bagi perekonomian maupun kesejahteraan masyarakat di Wilayah Kabupaten Malang. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 2.2 di bawah ini.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan PD

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK / IKU	Target Restra PD Tahun ke				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Prosentase Koperasi Aktif	-	√	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	
2	Prosentase Pertumbuhan UMKM	-	√	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	
Indikator program-program Dinas Koperasi dan Usaha Mikro												
1	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
6	Persentase fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah untuk kemudahan pelayanan bagi KUMKM	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
7	Persentase SDM KUMKM dalam pengembagn kewirausahaan dan peningkatan ketrampilan	-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	-	
8	Persentase peningkatan pemahaman tentang pengelolaan koperasi dan pengawasan koperasi	-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	-	

9	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)	-	-	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	
10	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	-	-	3471 HOK	5001 HOK	5197 HOK	5200 HOK	3471 HOK	3471 HOK	5001 HOK	5197 HOK	
11	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	-	-	42 HOK	35 HOK	39 HOK	40 HOK	42 HOK	42 HOK	35 HOK	39 HOK	
12	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	-	-	295 HOK	267 HOK	275 HOK	280 HOK	295 HOK	295 HOK	267 HOK	275 HOK	
13	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 Baru yang diadakan (Unit)	-	-	-	-	4 Unit	1 Unit	-	-	-	4 Unit	
14	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 Baru yang diadakan (Unit)	-	-	-	1 Unit	3 Unit	-	-	-	1 Unit	3 Unit	
15	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan(jenis)	-	-	-	2 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	-	-	2 Jenis	1 Jenis	
16	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	-	-	-	4 Jenis	2 Jenis	5 Jenis	-	-	4 Jenis	2 Jenis	
17	Jumlah Mebeleur yang diadakan (jenis)	-	-	-	-	-	1 Jenis	-	-	-	-	
18	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	-	-	30 Jenis	27 Jenis	25 Jenis	30 Jenis	30 Jenis	30 Jenis	27 Jenis	25 Jenis	
19	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	-	-	24 Unit	24 Unit	24 Unit	24 Unit	24 Unit	24 Unit	24 Unit	24 Unit	
20	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	-	-	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	
21	Jumlah Mebeleur yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	-	-	-	1 Jenis	-	1 Jenis	-	-	1 Jenis	-	
22	Jumlah Mesin/Kartu Absensi yang diadakan (unit)	-	-	-	1 Unit	-	1 Unit	-	-	1 Unit	-	
23	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga (Stel)	-	-	-	53 Stel	52 Stel	52 Stel	-	-	53 Stel	52 Stel	
24	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	-	-	13 Orang	11 Orang	15 Orang	15 Orang	13 Orang	13 Orang	11 Orang	15 Orang	
25	Jumlah Dokumen SAKIP (Buku)	-	-	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	
26	Jumlah Laporan Tahunan (Buku)	-	-	-	-	1 Buku	1 Buku	-	-	-	1 Buku	
27	Jumlah Dokumen Renstra (Buku)	-	-	-	-	1 Buku	1 Buku	-	-	-	1 Buku	
28	Jumlah Dokumen Renja (Buku)	-	-	-	-	1 Buku	1 Buku	-	-	-	1 Buku	

29	Jumlah Laporan Kinerja SKPD Triwulanan (I s/d III) (Buku)	-	-	-	-	1 Buku	1 Buku	-	-	-	1 Buku	
30	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	-	-	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	
31	Jumlah Koperasi yang diberikan sosialisasi dan yang dievaluasi tentang optimalisasi aset-aset Koperasi	-	-	27 kop/KUD	27 kop/KUD	-	-	27 kop/KUD	27 kop/KUD	27 kop/KUD	-	
32	Jumlah peserta pelatihan bagi tenaga kerja industri hasil tembakau	-	-	1.200 Orang	0	-	-	1.200 Orang	1.200 Orang	0	-	
33	Jumlah Koperasi yang diberikan bimbingan teknis pengembangan kemitraan usaha sektor riil dan temu usaha pengembangan jaringan usaha Koperasi	-	-	70 Kop	70 Kop	-	-	70 Kop	70 Kop	70 Kop	-	
34	jumlah orang yang diberikan pelatihan ketrampilan kerja	-	-	2.800 Orang	2.500 Orang	-	-	2.800 Orang	2.800 Orang	2.500 Orang	-	
35	Jumlah Peserta bimbingan teknis pengendalian dan pengawasan bagi pengawas koperasi wanita	-	-	150 Kopwan	140 Kopwan	-	-	150 Kopwan	150 Kopwan	140 Kopwan	-	
36	Jumlah Koperasi (Pengurus, Pengawas dan anggota Koperasi) yang diberikan bimbingan teknis perkoperasian dan Kelompok Ekonomi Produktif yang diberikan sosialisasi KEP	-	-	5 KEP	97 KSPPS, 35 Koperasi dan 10 KEP	-	-	5 KEP	5 KEP	97 KSPPS, 35 Koperasi dan 10 KEP	-	
37	Jumlah Penilaian terhadap Calon Koperasi Berprestas	-	-	5 Koperasi	5 Koperasi	-	-	5 Koperasi	5 Koperasi	5 Koperasi	-	
38	Jumlah Koperasi yang dinilai Kesehatannya (Penilaian Kesehatan Koperasi)	-	-	180 Kop	180 kop	-	-		180 Kop	180 kop	-	
39	Jumlah Peserta bimbingan teknis pengendalian dan pengawasan	-	-	-	-	390 orang	390 orang		-	-	390 orang	

40	Jumlah peserta bimbingan teknis perkoperasian dan pengawasan koperasi	-	-	-	-	50 Koperasi	50 Koperasi	-	-	-	50 Koperasi	
41	Jumlah Kelompok Ekonomi Produktif yang diberikan sosialisasi Perkoperasian	-	-	-	-	15 KEP	15 KEP	-	-	-	15 KEP	
42	Jumlah Peserta bimbingan teknis perkoperasian dan dasar-dasar akuntansi	-	-	-	-	97 KSPPS	97 KSPPS	-	-	-	97 KSPPS	
43	Jumlah Pembinaan Koperasi Berprestasi	-	-	-	-	5 Koperasi	5 Koperasi	-	-	-	5 Koperasi	
44	Jumlah Peserta sosialisasi peningkatan SDM Koperasi	-	-	-	-	35 Koperasi	35 Koperasi	-	-	-	35 Koperasi	
45	Jumlah Peserta Bimbingan teknis Pembinaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas koperasi	-	-	-	-	50 Koperasi	50 Koperasi	-	-	-	50 Koperasi	
46	Jumlah Anggota Koperasi dan Usaha Mikro yang ditingkatkan Manajemen Usaha dan daya saing produknya	-	-	-	-	250 Orang	250 Orang	-	-	-	250 Orang	
47	Jumlah Koperasi dan Usaha Mikro yang difasilitasi melalui Promosi dan Pameran tingkat Nasional dan Regional	-	-	-	-	12 Kop	12 Kop	-	-	-	12 Kop	
48	Jumlah Anggota Koperasi yang dikembangkan jenis produknya melalui inkubator bisnis dan teknologi	-	-	-	-	350 Orang	350 Orang	-	-	-	350 Orang	

49	Jumlah anggota Koperasi yang difasilitasi akses permodalan dan fasilitasi jaringan kerjasama antar koperasi	-	-	313 Koperasi	313 Koperasi	313 Koperasi	313 Koperasi	313 Koperasi	313 Koperasi	313 Koperasi	313 Koperasi	
50	Jumlah Koperasi yang di berikan bimbingan teknis Manajemen Usaha Simpan Pinjam sesuai dengan ketentuan	-	-	120 Koperasi	120 Koperasi	120 Koperasi	120 Koperasi	120 Koperasi	120 Koperasi	120 Koperasi	120 Koperasi	
51	Jumlah Koperasi yang dinilai kesehatannya	-	-	-	-	135 Koperasi	135 Koperasi	-	-	-	135 Koperasi	
52	Jumlah Koperasi yang diberikan sosialisasi peningkatan akses pembiayaan Koperasi	-	-	-	90 Koperasi Wanita	-	-	-	-	90 Koperasi Wanita	-	
53	Jumlah Koperasi penerima dana hibah pemerintah yang diberikan fasilitasi pembinaan	-	-	200 Kopwan/K opkar/KSP PS/Koppon tren	200 Kopwan/K opkar/KSP PS/Koppon tren	-	-	200 Kopwan/K opkar/KSP PS/Koppon tren	200 Kopwan/K opkar/KSP PS/Koppon tren	200 Kopwan/K opkar/KSP PS/Koppon tren	-	
54	Jumlah Sarana dan Prasarana Pusat Layanan Usaha Terpadu- Koperasi dan UMKM (PLUT-KUMKM) yang diadakan	-	-	-	47 jenis	-	-	-	-	47 jenis	-	
55	Jumlah KUMKM yang difasilitasi Promosi dan Pameran	-	-	75 KUMKM	-	-	-	75 KUMKM	75 KUMKM	-	-	
56	Jumlah KUMKM yang diberikan layanan berupa Fasilitasi, Konsultasi dan Advokasi pada KUMKM terhadap Permasalahan yang dihadapi (Permodalan, Pemasaran,TTG dan Peningkatan SDM UMKM)	-	-	300 Orang	-	-	-	300 Orang	300 Orang	-	-	
57	Jumlah UMKM yan difasilitasi promosi produk UMKM Tingkat Kabupaten dan Tingkat Provinsi	-	-	-	100 UMKM	-	-	-	-	100 UMKM	-	

58	Jumlah KUMKM yang difasilitasi Kegiatan Promosi Produk KUMKM yang dipamerkan di luar daerah provinsi dan di tingkat nasional.	-	-	6 KUMKM	5 KUMKM	-	-	6 KUMKM	6 KUMKM	5 KUMKM	-	
59	Jumlah Peserta pelatihan pengembangan usaha retail dan pelatihan pengembangan usaha PKL	-	-	70 Koperasi	150 orang	-	-	70 Koperasi	70 Koperasi	150 orang	-	
60	Jumlah Koperasi beranggota Pelaku UMKM penerima dana pemerintah yang dimonitoring dan dievaluasi	-	-	35 Koperasi	35 Koperasi	-	-	35 Koperasi	35 Koperasi	35 Koperasi	-	
61	jumlah UMKM dan Koperasi yang diberikan pelayanan Bantuan Dana Bergulir untuk Peningkatan Permodalan	-	-	130 KUMKM	130 KUMKM	-	-	130 KUMKM	130 KUMKM	130 KUMKM	-	
62	Jumlah desa yang di petakan produk unggulan dan Jumlah Fasilitas Kerjasama dengan lembaga terkait	-	-	-	-	390 Desa / kelurahan dan 5 Kerjasama	390 Desa / kelurahan dan 5 Kerjasama	-	-	-	390 Desa / kelurahan dan 5 Kerjasama	
63	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana PLUT-KUMKM	-	-	-	-	11 Jenis	11 Jenis	-	-	-	11 Jenis	
64	Jumlah Orang yang diberikan Honor untuk mengelola PLUT-KUMKM selama 12 bulan	-	-	-	-	10 Orang	10 Orang	-	-	-	10 Orang	
65	Jumlah orang yang difasilitasi melalui pendampingan Pusat Layanan Usaha Terpadu KUMKM	-	-	-	-	200 Orang	200 Orang	-	-	-	200 Orang	
66	Jumlah fasilitasi promosi di tingkat Nasional, tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten	-	-	-	-	9 Pameran	9 Pameran	-	-	-	9 Pameran	

67	Jumlah Usaha Mikro, kecil, menengah dan Koperasi yang diberikan pelayanan bantuan pinjamam Dana Bergulir	-	-	-	-	125 KUMKM	125 KUMKM	-	-	-	125 KUMKM	
68	Jumlah orang yang diberikan pembinaan dan pelatihan ketrampilan	-	-	-	-	2.000 Orang	2.000 Orang	-	-	-	2.000 Orang	
69	Jumlah fasilitasi Promosi produk usaha yang diikuti/diadakan	-	-	-	-	5 event	5 Event	-	-	-	5 event	

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI

Sebagai salah satu Dinas di Kabupaten Malang yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah maka peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam mendukung Visi dan Misi Kabupaten yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Malang yang Madep Mantep Manetep” adalah dengan Mewujudkan Pertumbuhan Koperasi dan Usaha Mikro yang mempunyai daya saing tinggi serta mendukung iklim usaha yang kondusif, dan akan berpengaruh pada penciptaan kondisi ekonomi yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan daerah yaitu dengan cara melaksanakan kinerja sesuai dengan prinsip-prinsip perkopersian dan perundang – undangan yang berlaku.

Untuk mencapai kondisi kinerja yang akuntabel dan optimal setiap satuan kerja harus mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh satuan kerja tersebut, adapun permasalahan yang teridentifikasi pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang antara lain:

- a. Kurang adanya pemahaman Pelayanan tentang Perkoperasian dan Kewirausahaan dari satuan kerja terkait di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang terkait Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima sangat tinggi;
- b. Berlakunya perdagangan bebas menyebabkan tingkat persaingan semakin kompetitif bagi Pelaku UMKM dan Koperasi
- c. Krisis keuangan dan perekonomian global serta dampaknya terhadap keuangan dan perekonomian Nasional dan daerah.
- d. Angka kemiskinan dan pengangguran masih tinggi.
- e. Sumberdaya manusia

Keterbatasan kemampuan dan pemahaman para pengelola koperasi tentang teknis perkoperasian serta pemahaman tentang wawasan pengetahuan dan ketrampilan kewirausahaan kurang memadai, sehingga berdampak kepada pengelolaan manajemen, produktifitas Koperasi dan UKM.

- f. Permodalan

Kemampuan pemupukan permodalan sendiri bagi anggota Koperasi dan UMKM masih terbatas dan Kemitraan dengan Perbankan dalam membuka terobosan usaha baru masih belum optimal.

g. Teknologi

Kemampuan dalam mengakses teknologi dan alih teknologi masih kurang sehingga belum menghasilkan produksi dengan kualitas dan nilai tambah yang efisien.

h. Kerjasama Usaha / Jaringan Usaha

Kerjasama antar koperasi baik vertikal maupun horisontal dengan badan usaha lain belum dapat berkembang, koperasi masih bekerja untuk kepentingan sendiri dan kurang mampu mempergunakan sarana komunikasi dan teknologi.

i. Pasar

Belum memanfaatkan peluang pasar yang dimiliki oleh Koperasi dan UMKM utamanya dalam pelayanan kebutuhan anggota dan masyarakat.

Dari permasalahan tersebut diatas upaya-upaya yang perlu dilakukan antara lain:

- a. Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan pedoman atau acuan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya yang bertujuan antara lain menciptakan komitmen mengenai apa yang dikerjakan oleh satuan kerja untuk mewujudkan *good governance*, sehingga diharapkan dengan adanya SOP setiap unit kerja dapat menerapkan prosedur kerja dan sistim kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- b. Penguatan dan Perluasan Akses Usaha dan Jaringan Pasar Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui Griya KUMKM maupun pameran-pameran baik di tingkat lokal, regional, nasional maupun internasional;
- c. Memberikan Fasilitas Perkuatan Kemandirian Usaha Mikro dengan cara pembinaan atau bimtek;
- d. Memberikan pemahaman pengembangan usaha yang bertujuan untuk meningkatkan kewirausahaan KUMKM serta menumbuhkan Wirausaha baru;
- e. Memberikan Bimtek agar kualitas SDM pengelola Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) meningkat;
- f. Peningkatan Akses Permodalan bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui PPK BLUD Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Malang atau dari Pemerintah Pusat,

Propinsi dan serta dengan Lembaga Perbankan maupun Lembaga non Bank;

- g. Memberikan pelatihan-pelatihan KUMKM yang berbasis IPTEK;
- h. Memberikan akses maupun pemahaman kepada KUMKM agar mampu mempergunakan sarana komunikasi dan teknologi dengan baik;
- i. Memberikan pemahaman kepada anggota tentang arti pentingnya koperasi;

Adapun tantangan dan peluang Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

1. Tantangan

- a. Dengan adanya AEC (Asian Economic Community) tahun 2015 menjadi tantangan bagi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro untuk meningkatkan daya saing koperasi dan UMKM baik dari sisi kelembagaan maupun dari sisi produk yang dihasilkan.
- b. Peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Koperasi dalam perekonomian daerah masih kecil.
- c. Jumlah pengangguran dan masyarakat miskin masih cukup besar.
- d. Produk yang dihasilkan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah masih kurang.
- e. Kurangnya pemahaman peinsip-prinsip perkoperasian sehingga SDM pengelola Koperasi masih kurang memadai.
- f. Kurangnya sumber daya aparatur pelayanan dan sumber pembiayaan terbatas terhadap Koperasi dan UMKM

2. Peluang

- a. Globalisasi perekonomian dunia dan terbukanya pasar bebas untuk ASEAN yaitu AEC (Asian Economic Community) tahun 2015 akan membuka peluang bisnis bagi pelaku
- b. Adanya peluang kebijakan otonomi daerah yang memberi peluang untuk mengapresiasi kebutuhan masyarakat dan merencanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan daerah.
- c. Adanya Arah kebijakan pembangunan daerah dalam memacu pertumbuhan sektor andalan pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, industri, perdagangan dan jasa-jasa; serta mendorong pertumbuhan sektor potensi seperti pariwisata, pertambangan dan jasa konstruksi/bangunan dengan mengarusutamakan peran usaha mikro, kecil dan menengah dan koperasi dan pengentasan kemiskinan

- d. Adanya dukungan stekholder dalam peningkatan ekonomi kerakyatan melalui koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah.
- e. Sumberdaya Alam Kabupaten Malang terkandung kekayaan yang tiada tara dan tersedianya keragaman bahan baku bagi produk inovatif Koperasi dan UMKM.

Sesuai dengan hasil penelaahan terhadap permasalahan, langkah selanjutnya adalah menentukan isu-isu strategis adapun isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Masih terbatasnya jumlah tenaga perkoperasian dan UMKM yang kompeten.
2. Masih terbatasnya fasilitasi bagi peningkatan akses permodalan bagi koperasi dan UMKM (KUMKM).
3. Tingkat kemiskinan masih tinggi didasari dengan angka kemiskinan Kabupaten Malang pada tahun 2014 sebesar 11.07%.
4. Daya saing Koperasi dan UMKM di Kabupaten Malang masih lemah dan terbatas.
5. Pembangunan Gedung Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT-KUMKM) pada tahun 2016 di Kabupaten Malang yang merupakan program kementerian Koperasi dan UMKM dapat dijadikan fasilitas bagi koperasi dan UMKM untuk meningkatkan daya saing.
6. Pembangunan Pasar Rakyat di Pasar Donomulyo Kabupaten Malang pada tahun 2016 yang merupakan program kementerian Koperasi dan UMKM merupakan salah satu fasilitas untuk meningkatkan promosi agar lebih baik.

Dari analisa-analisa diatas merupakan isu-isu strategis pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yang perlu diperhatikan dan merupakan unsur penting dalam setiap pengelolaan pengambilan keputusan dalam kaitannya dengan Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Malang, oleh karenanya peningkatan kinerja merupakan sebuah ikhtiar untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Tahun 2016 merupakan masa transisi pemerintahan di Kabupaten Malang. Rancangan akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Kabupaten Malang Tahun 2018 telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 45 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada. Dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, sehingga perlu dilakukan review terhadap RKPD untuk menyesuaikan dengan Misi Bupati yang didukung sasaran, strategi dan kebijakan serta hasil analisa kebutuhan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang didukung Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Selain itu, dengan berlakunya Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, terdapat perubahan susunan dan fungsi organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang, termasuk susunan dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro juga mengalami perubahan.

Berdasarkan review Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 dan analisa kebutuhan pelaksanaan kinerja pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dengan hasil sebagai berikut:

1. Adanya perubahan nomenklatur pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro , maka perlu penambahan kegiatan yang berkaitan dengan pengawasan koperasi dan restrukturasi Usaha Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan menengah, maka perlu diakomodir dalam Rencana Kerja Tahun 2018.
2. Adanya perubahan anggaran hasil analisis kebutuhan, perubahan anggaran tersebut terdapat pada program Peningkatan Peningkatan Administrasi Perkantoran, Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur, Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan, Peningkatan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro, Peningkatan Produksi Dan Pemasaran Koperasi dan Usaha Mikro, Peningkatan Akses Pembiayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Pengembangan dan restrukturasi Usaha, Peningkatan permodalan Koperasi dan Usaha Mikro, Pembinaan Lingkungan

Sosial Industri.

3. Adanya perubahan anggaran hasil analisis kebutuhan, perubahan anggaran tersebut terdapat pada kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat, Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan jasa Administrasi Keuangan, Penyediaan jasa kebersihan kantor, Penyediaan alat tulis kantor, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, Penyediaan bahan logistik kantor, Penyediaan Makanan dan Minuman, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah, Pengadaan Kendaraan dinas operasional, Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor, Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor, Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional, Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan kantor, Pemeliharaan Rutin/berkala mebeleur , Pendidikan dan Pelatihan Formal, Laporan kinerja PD, Penyusunan pelaporan keuangan Semesteran, Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian, Sosialisasi Prinsip-prinsip Pemahaman Perkoperasian, Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi, Penguatan manajemen Usaha dan Daya saing produk Koperasi dan Usaha MikroPembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat, Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro melalui pameran tingkat regional dan nasional, Pengembangan Inkubator teknologi dan bisnis serta diversifikasi Usaha Produk Koperasi, Koordinasi dan Penguatan akses permodalan Koperasi serta jaringan kerjasama usaha simpan pinjam antar Koperasi, Penataan Manajemen Usaha Simpan pinjam Koperasi, Penilaian Kesehatan Koperasi, Pengembangan Jaringan KerjasamaSosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian, Pengembangan kewirausahaan, Pengembangan sarana pemasaran produk usaha mikro, Peningkatan permodalan KUMKM melalui Dana Bergulir, Pembinaan dan Pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat.
4. Beberapa program dan kegiatan masih mendukung pencapaian sasaran sehingga relevan dilaksanakan lagi seperti Program dan Kegiatan generik yang berkaitan dengan operasional kantor.

5. Adanya tambahan satu program yaitu Pembinaan dan Pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat, program tersebut dikhususkan untuk dana DBHACT

Uraian hasil Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini:

Tabel 2.3

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2018

NO		RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
		PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
A		BELANJA LANGSUNG				7.953.516.750	BELANJA LANGSUNG				7.370.314.800	
1.		Program Peningkatan Administrasi Perkantoran	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	723.395.750	Program Peningkatan Administrasi Perkantoran	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	740.673.100	
	1.1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	4.250 buah	178.840.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	4.500 buah	177.815.000	
	1.2.	Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	12 Bulan	65.800.500	Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	12 Bulan	66.130.500	
	1.3.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	15 OB	55.160.000	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	118 OB	50.925.000	

	1.4.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Griya UMKM Kab. Malang	Jumlah petugas kebersihan (OB)	3 OB	52.366.500	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Griya UMKM Kab. Malang	Jumlah petugas kebersihan (OB)	36 OB	45.600.000	
	1.5.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	59 Jenis	74.570.775	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	47 Jenis	61.925.000	
	1.6.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	14 Jenis	55.130.375	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	14 Jenis	46.653.000	
	1.7.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	10 Jenis	5.759.600	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	10 Jenis	8.574.100	

	1.8.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	2 Jenis	4.200.000	Penyediaan Bahan dan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	1 Jenis	2.880.000	
	1.9.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)	3 Jenis	15.448.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)	2 Jenis	11.328.000	
	1.10.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	53 HOK	71.420.000	Penyediaan Makanan dan Minuman	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	5197 HOK	105.422.500	
	1.11.	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	11 HOK	40.775.000	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	39 HOK	63.550.000	
	1.12.	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	16 HOK	103.925.000	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	275 HOK	99.870.000	

2.		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	755.747.850	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	1.190.382.000	
	2.1.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 Baru yang diadakan (Unit)	2 Unit mobil dan 3 unit sepeda motor	525.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 Baru yang diadakan (Unit)	4 Unit	934.512.000	
				Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 Baru yang diadakan (Unit)	-	-			Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 Baru yang diadakan (Unit)	3 Unit	75.000.000	
	2.2.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan(jenis)	3 Jenis	6.500.000	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan(jenis)	1 Jenis	30.000.000	
	2.3.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	5 Jenis	50.000.000	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	2 Jenis	19.650.000	
	2.4.	Pengadaan Mebeleur	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah Mebeleur yang diadakan (jenis)	2 Jenis	30.000.000	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah Mebeleur yang diadakan (jenis)	-	-	

	2.5	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	3 Jenis	62.378.000	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	25 Jenis	49.915.000	
	2.6.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	24 Unit	64.836.500	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	24 Unit	66.850.000	
	2.7.	Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan Gedung Kantor	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	5 Jenis	17.033.350	Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan Gedung Kantor	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	5 Jenis	14.455.000	
	2.8.	Pemeliharaan Rutin/berkala mebeleur	-	-	-	-	Pemeliharaan Rutin/berkala mebeleur	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah pemeliharaan yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	-	-	
3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	42.820.000	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	27.820.000	
	3.1	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah Mesin/Kartu Absensi yang diadakan (unit)	-	-	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah Mesin/Kartu Absensi yang diadakan (unit)	-	-	

	3.2	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga (Stel)	64 Stel kaos olahraga dan 23 stel pakaian	42.850.000	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga (Stel)	52 Stel	27.820.000	
4.		Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	10.000.000	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	7.200.000	
	4.1.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	11 Orang	10.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	15 Orang	7.200.000	
5		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	64.564.000	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	103.864.000	
	5.1.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah Dokumen SAKIP (Buku)	1 Buku	58.365.000	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah Dokumen SAKIP (Buku)	1 Buku	75.365.000	
			-	-	-	-	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah Laporan Tahunan (Buku)	1 Buku	8.000.000	

			-	-	-	-		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah Dokumen Renstra (Buku)	1 Buku	7.000.000	
			-	-	-	-		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah Dokumen Renja (Buku)	1 Buku	7.000.000	
			-	-	-	-		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah Laporan Kinerja SKPD Triwulanan (I s/d III) (Buku)	1 Buku	3.000.000	
	5.2	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	1 Buku	6.199.000	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	1 Buku	3.499.000	
6		Program Peningkatan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro	Kab. Malang	Presentase Koperasi yang telah dibina kelembagaan dan Pengawasan	100%	948.763.000	Program Peningkatan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro	Kab. Malang	Presentase Koperasi yang telah dibina kelembagaan dan Pengawasan	100%	850.344.050	

	6.1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Kab Malang	Jumlah Peserta bimbingan teknis pengendalian dan pengawasan	97 Kopwan	187.267.600	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Kab Malang	Jumlah Peserta bimbingan teknis pengendalian dan pengawasan	390 orang	239.616.550	Yang diusulkan sesuai dengan Musrenbang Tahun 2018 yaitu di Desa Sumbersekar Kec Dau dan Desa Genengan Kec. Pakisaji
	6.2	Sosialisasi Prinsip - prinsip Pemahaman Perkoperasian	Kab Malang	Jumlah peserta bimbingan teknis perkoperasian, bimbingan teknis dasar-dasar akuntansi dan sosialisasi KEP	97 KSPPS, 50 Koperasi baru 93 koperasi tidak aktif dan 15 KEP	446.248.000	Sosialisasi Prinsip - prinsip Pemahaman Perkoperasian	Kab Malang	Jumlah peserta bimbingan teknis perkoperasian dan pengawasan koperasi	50 Koperasi	85.000.000	Merupakan kegiatan yang terkait dengan Pengarusutamaan Gender (PUG)
			-	-	-	-		Kab Malang	Jumlah Kelompok Ekonomi Produktif yang diberikan sosialisasi Perkoperasian	15 KEP	116.280.000	
			-	-	-	-		Kab Malang	Jumlah Peserta bimbingan teknis perkoperasian dan dasar-dasar akuntansi	97 KSPPS	244.200.050	

	6.3	Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	Kab Malang	Jumlah peserta bimtek pembinaan kantor cabanga, kantor cabang pembantu dan kantor kas koperasi, jumlah peserta sosialisasi peningkatan SDM Koperasi, jumlah pembinaan koperasi berprestasi dan jumlah koperasi yang dinilai kesehatannya	114 Kanca/k ancapem /kankas, 70 koperasi berprestasi dan 200 koperasi	315.247.400	Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	Kab Malang	Jumlah Pembinaan Koperasi Berprestasi	5 Koperasi	36.180.000	
								Kab Malang	Jumlah Peserta sosialisasi peningkatan SDM Koperasi	35 Koperasi	29.067.450	
								Kab Malang	Jumlah Peserta Bimbingan teknis Pembinaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas koperasi	50 Koperasi	100.000.000	
7		Program Peningkatan Produksi dan Pemasaran Koperasi dan Usaha Mikro	Kab Malang	Persentase Jumlah koperasi yang mendapat akses peningkatan produksi dan pemasaran	100%	700.000.000	Program Peningkatan Produksi dan Pemasaran Koperasi dan Usaha Mikro	Kab Malang	Persentase Jumlah koperasi yang mendapat akses peningkatan produksi dan pemasaran	100%	660.000.000	

	7.1	Penguatan Manajemen Usaha dan daya Saing Produk Koperasi dan Usaha Mikro	Kab Malang	Jumlah Anggota Koperasi dan Usaha Mikro yang ditingkatkan Manajemen Usaha dan daya saing produknya	250 anggota koperasi	190.000.000	Penguatan Manajemen Usaha dan daya Saing Produk Koperasi dan Usaha Mikro	Kab Malang	Jumlah Anggota Koperasi dan Usaha Mikro yang ditingkatkan Manajemen Usaha dan daya saing produknya	250 Orang	190.000.000	
	7.2	Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro melalui Pameran Tingkat Regional dan Nasional	Kab Malang	Jumlah Koperasi dan Usaha Mikro yang difasilitasi melalui Promosi dan Pameran tingkat Nasional dan Regional	12 Kop	180.000.000	Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro melalui Pameran Tingkat Regional dan Nasional	Kab Malang	Jumlah Koperasi dan Usaha Mikro yang difasilitasi melalui Promosi dan Pameran tingkat Nasional dan Regional	12 Kop	180.000.000	
	7.3	Pengembangan Inkubakator Teknologi dan Bisnis serta diversifikasi Usaha Produk Koperasi	Kab Malang	Jumlah Anggota Koperasi yang dikembangkan jenis produknya melalui inkubator bisnis	75 Koperasi	290.000.000	Pengembangan Inkubakator Teknologi dan Bisnis serta diversifikasi Usaha Produk Koperasi	Kab Malang	Jumlah Anggota Koperasi yang dikembangkan jenis produknya melalui inkubator bisnis dan teknologi	350 Orang	290.000.000	Merupakan kegiatan yang terkait dengan Pengarusutamaan Gender (PUG)
8		Program Peningkatan Akses Pembiayaan Koperasi dan Usaha Mikro	Kab Malang	Persentase Koperasi yang Mendapatkan peningkatan akses pembiayaan	100%	408.148.950	Program Peningkatan Akses Pembiayaan Koperasi dan Usaha Mikro	Kab Malang	Persentase Koperasi yang Mendapatkan peningkatan akses pembiayaan	100%	508.598.950	
	8.1	Koordinasi dan Penguatan Akses Permodalan Koperasi Serta Jaringan Kerjasama Usaha Simpan Pinjam Antar Koperasi	Kab Malang	Jumlah anggota Koperasi yang difasilitasi akses permodalan dan fasilitasi jaringan kerjasama antar koperasi	220 anggota koperasi dan 93 koperasi	207.254.500	Koordinasi dan Penguatan Akses Permodalan Koperasi Serta Jaringan Kerjasama Usaha Simpan Pinjam Antar Koperasi	Kab Malang	Jumlah anggota Koperasi yang difasilitasi akses permodalan dan fasilitasi jaringan kerjasama antar koperasi	313 Koperasi	207.254.500	
	8.2	Penataan Manajemen Usaha Simpan Pinjam Koperasi	Kab Malang	Jumlah Koperasi yang di berikan bimbingan teknis	120 KSP/USP	70.450.000	Penataan Manajemen Usaha Simpan Pinjam Koperasi	Kab Malang	Jumlah Koperasi yang di berikan bimbingan teknis Manajemen Usaha	120 Koperasi	100.450.000	Merupakan kegiatan yang terkait dengan Pengarusutaman

				Manajemen Usaha Simpan Pinjam sesuai dengan ketentuan					Simpan Pinjam sesuai dengan ketentuan			aan Gender (PUG)
	8.3	Pemberdayaan Usaha Simpan Pinjam Koperasi	Kab Malang	Jumlah Koperasi yang dinilai kesehatannya	90 Koperasi	130.444.450		-	-	-	-	
			-	-	-	-	Penilaian Kesehatan Koperasi	Kab Malang	Jumlah Koperasi yang dinilai kesehatannya	135 Koperasi	200.894.450	
	9	Program Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha	Kab Malang	Persentase Usaha mikro yang meningkat menjadi usah kecil	100%	3.955.047.200	Program Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha	Kab Malang	Persentase Usaha yang dikembangkan dan direstrukturisasi	100%	1.220.432.700	
	9.1	Pengembagan Jaringan Kerjasama	Kab Malang	Jumlah desa yang di petakan produk unggulan dan Jumlah Fasilitas Kerjasama dengan lembaga terkait	390 Desa / keluraha n dan 5 Kerjasam a	190.490.000	Pengembagan Jaringan Kerjasama	Kab Malang	Jumlah desa yang di petakan produk unggulan dan Jumlah Fasilitas Kerjasama dengan lembaga terkait	390 Desa / keluraha n dan 5 Kerjasam a	90.490.000	
	9.2	Pengembangan Kewirausahaan	Kab Malang	Jumlah wira usaha pemula yang difasilitasi pelatihan ketrampilan bagi masyarakat	3.500 orang	2.958.614.500	Pengembangan Kewirausahaan	Kab Malang	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana PLUT-KUMKM	11 Jenis	300.000.000	- Yang diusulkan sesuai dengan Musrenbang Tahun 2018 yaitu di Desa
			-	-	-	-		Kab Malang	Jumlah Orang yang diberikan Honor untuk mengelola PLUT-KUMKM selama 12 bulan	10 Orang	174.000.000	Pait Kec. Kasembon dan Desa Sekarbanyu Kec Sumbermanjin g wetan

			-	-	-	-		Kab Malang	Jumlah orang yang difasilitasi melalui pendampingan Pusat Layanan Usaha Terpadu KUMKM	200 Orang	150.000.000	- Merupakan kegiatan yang terkait dengan Pengarusutamaan Gender (PUG)
	9.3	Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro	Kab Malang	Jumlah fasilitasi promosi di tingkat Nasional, tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten	9 Pameran, 1 PLUT KUMKM	805.942.700	Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro	Kab Malang	Jumlah fasilitasi promosi di tingkat Nasional, tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten	9 Pameran	505.942.700	
¹⁰		Program Peningkatan Permodalan Koperasi dan Usaha Mikro	Kab Malang	Persentase target pendapatan Asli Daerah melalui Dana bergulir	100%	345.000.000	Program Peningkatan Permodalan Koperasi dan Usaha Mikro	Kab Malang	Persentase target pendapatan Asli Daerah melalui Dana bergulir	100%	335.000.000	
	10.1	Peningkatan Permodalan KUMKM Melalui UPT Pengelola Dana Bergulir	Kab Malang	Jumlah Usaha Mikro, kecil, menengah dan Koperasi yang diberikan pelayanan bantuan pinjamam Dana Bergulir	125 KUMKM	345.000.000	Peningkatan Permodalan KUMKM Melalui UPT Pengelola Dana Bergulir	Kab Malang	Jumlah Usaha Mikro, kecil, menengah dan Koperasi yang diberikan pelayanan bantuan pinjamam Dana Bergulir	125 KUMKM	335.000.000	Yang diusulkan sesuai dengan Musrenbang Tahun 2018 yaitu di Desa Purwoasri Kec. Singosari
¹¹		-	-	-	-	-	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Kab Malang	Persentase masyarakat yang diberikan pembinaan dan pelatihan ketrampilan	100%	1.726.000.000	
	11.1	-	-	-	-	-	Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat	Kab Malang	Jumlah orang yang diberikan pembinaan dan pelatihan ketrampilan	2.000 Orang	1.426.000.000	

			-	-	-	-		Kab Malang	Jumlah fasilitasi Promosi produk usaha yang diikuti/diadakan	5 event	300.000.000	
Jumlah						7.953.516.750					7.370.314.800	

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Musrenbang Kecamatan yang merupakan forum musyawarah antar para pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa/Kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah kabupaten di wilayah kecamatan telah dilaksanakan dengan baik pada masing-masing wilayah kecamatan.

Dalam urusan bidang koperasi dan usaha mikro, Kecil dan menengah jumlah usulan dari Kecamatan masih sangat besar bila dibandingkan kemungkinan ketersediaan Anggaran. Diakui pula sebagian usulan masih bersifat keinginan belum merupakan kebutuhan prioritas yang didasarkan atas kajian yang komprehensif, selain itu juga untuk membahas dan menetapkan prioritas kegiatan pembangunan di Kabupaten Malang khususnya urusan bidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah maka, peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang sangat dibutuhkan sehingga dalam melaksanakan program dan kegiatan menyesuaikan anggaran yang tersedia. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 2.4 di bawah ini.

Tabel 2.4
Penelaah Usulan Program dan Kegiatan masyarakat Tahun 2018

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Desa sumbersekar, Kec Dau	Memahami Administrasi Perkoperasian	1 unit	Disepakati dengan mengajukan Proposal ke Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
2	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Karangploso	Tersedianya barang-barang inventaris kantor berupa lemari. Laptop dan mebeleur kantor	4 paket	Diusulkan ke Musrenbang Provinsi, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro tidak bisa mengakomodir pengadaan inventaris kantor
3	Pengembangan Kewirausahaan	Desa Pait, Kec kasembon	Terciptanya home industry	3 Home industry	Disepakati dengan mengajukan proposal ke Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab Malang
4	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Desa Genengan, kec Pakisaji	Pelatihan Administrasi dan Manajemen	Peningkatan SDM pengurus Koperasi dan Kemandirian lembaganya	Disepakati dengan mengajukan proposal ke Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab Malang
5	Peningkatan Permodalan KUMKM Melalui UPT Pengelola Dana Bergulir	Desa Purwoasri, Kec Singosari	Modal Usaha	10 orang	Disepakati Dengan Diberikan Pinjaman Melalui UPT Pengelola Dana Bergulir Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Malang
6	Pengembangan Kewirausahaan	Desa Sekarbanyu, Kec Sumbermanjing wetan	Pelatihan menjahit	20 orang	Disepakati dengan mengajukan proposal ke Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab Malang

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dimana kebijakan Otonomi Daerah dengan memberikan kewenangan yang luas dan nyata serta bertanggungjawab kepada daerah yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perkembangan Koperasi di era Undang - Undang No. 32 Tahun 2004, dalam kaitannya dengan pelaksanaan Undang - Undang No. 25 Tahun 1992 yang mana selalu dikaitkan dengan kebijakan Pemerintah dengan kebijakan Koperasi dan UMKM yang menjadi primadona kebijakan Presiden terpilih, dan pada kebijakan ini pemerintah berharap dalam mengelola urusan pemerintahan yang menjadi otonominya, daerah tentu membutuhkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta biaya. Sebagaimana diketahui kemampuan sumber daya manusia dan kemampuan APBD setiap daerah tidak sama, sehingga dalam mengelola otonomi daerahnya ada keterbatasan dan kendala.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang salah satu dinas teknis di Kabupaten Malang yang mempunyai tugas pokok dan fungsi Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati Malang sesuai bidang tugasnya dan mengolah data sampai dengan melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan Kegiatan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Instruksi presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional mengamanatkan kepada seluruh Menteri, Kepala Lembaga, Gubernur dan Bupati/Walikota untuk mengintegrasikan Pengarusutamaan Gender pada setiap tahapan proses pembangunan, mulai dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi seluruh kebijakan,

program dan kegiatan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota pada semua bidang pembangunan. Dalam rangka mengintegrasikan pengarusutamaan gender dalam proses perencanaan penganggaran. Pada tahun 2003 diterbitkan keputusan menteri dalam negeri nomor 132 tahun 2003 tentang pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam pembangunan di daerah. Pada tahun 2008 diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Peraturan ini menginstruksikan pada semua unit pemerintah di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, untuk mengintegrasikan pengarusutamaan gender ke dalam perencanaan dan penganggaran. Menurut Permendagri tersebut, penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan berperspektif gender dituangkan dalam RPJMD, Rencana Strategis Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA

a. Tujuan

1. Meningkatkan kualitas kelembagaan dan organisasi Koperasi agar Koperasi mampu dan berkembang secara sehat jati dirinya menjadi wadah kepentingan bersama bagi anggotanya untuk memperoleh efisiensi kolektif, sehingga citra Koperasi menjadi baik.
2. Mengembangkan jiwa dan semangat kewirausahaan, dan meningkatkan daya saing UKM, sehingga pengetahuan serta sikap wirausaha semakin berkembang, produktivitas meningkat, wira usaha baru berbasis pengetahuan dan teknologi meningkat jumlahnya, dan ragam produk-produk unggulan UKM semakin berkembang.

b. Sasaran

Sasaran yang merupakan target atau hasil yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam tahun 2018 adalah :

1. Meningkatnya jumlah koperasi Aktif.
2. Meningkatnya jumlah Usaha mikro Kecil dan menengah.

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Dengan melihat Lampiran Tabel 3.1 dapat disimpulkan bahwa rencana Program dan Kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang Tahun 2018 telah disesuaikan dengan anggaran dengan program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Administrasi Perkantoran;
 - (1) Penyediaan jasa surat menyurat
 - (2) Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - (3) Penyediaan jasa Administrasi Keuangan
 - (4) Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - (5) Penyediaan alat tulis kantor
 - (6) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - (7) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - (8) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - (9) Penyediaan bahan logistik kantor
 - (10) Penyediaan Makanan dan Minuman
 - (11) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
 - (12) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - (1) Pengadaan Kendaraan dinas operasional
 - (2) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
 - (3) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
 - (4) Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
 - (5) Pemeliharaan Rutin/ berkala Kendaraan Dinas / Operasional
 - (6) Pemeliharaan Rutin/ berkala Peralatan kantor
 - (7) Pemeliharaan Rutin/ berkala mebeleur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - (1) Pengadaan Mesin/Kartu Absensi
 - (2) Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
4. Kapasitas Sumber daya Aparatur
 - (1) Pendidikan dan Pelatihan Formal
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
 - (1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - (2) Penyusunan pelaporan keuangan Semesteran

6. Program Peningkatan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro
 - (1) Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian
 - (2) Sosialisasi Prinsip-prinsip Pemahaman Perkoperasian
 - (3) Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi
7. Program Peningkatan Produksi Dan Pemasaran Koperasi dan Usaha Mikro
 - (1) Penguatan manajemen Usaha dan Daya saing produk Koperasi dan Usaha Mikro Pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat
 - (2) Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro melalui pameran tingkat regional dan nasional
 - (3) Pengembangan Inkubator teknologi dan bisnis serta diversifikasi Usaha Produk Koperasi
8. Program Peningkatan Akses Pembiayaan Koperasi dan Usaha Mikro
 - (1) Koordinasi dan Penguatan akses permodalan Koperasi serta jaringan kerjasama usaha simpan pinjam antar Koperasi
 - (2) Penataan Manajemen Usaha Simpan pinjam Koperasi
 - (3) Penilaian Kesehatan Koperasi
9. Program Pengembangan dan restrukturasi Usaha
 - (1) Pengembangan Jaringan Kerjasama
 - (2) Pengembangan kewirausahaan
 - (3) Pengembangan sarana pemasaran produk usaha mikro
10. Program Peningkatan permodalan Koperasi dan Usaha Mikro
 - (1) Peningkatan permodalan KUMKM melalui Dana Bergulir
11. Program Pembinaan Lingkungan Sosial Industri
 - (1) Pembinaan dan Pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Pada tahun 2008 diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011, maka dalam Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro tahun akan dituangkan pada 4 program 4 Kegiatan yaitu :

1. Program Peningkatan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro

- (1) Kegiatan sosialisasi Prinsip-prinsip Pemahaman Perkoperasian
- 2. Program Peningkatan Produksi Dan Pemasaran Koperasi dan Usaha Mikro
 - (1) Kegiatan Pengembangan Inkubator teknologi dan bisnis serta diversifikasi Usaha Produk Koperasi
- 3. Program Peningkatan Akses Pembiayaan Koperasi dan Usaha Mikro
 - (1) Penataan Manajemen Usaha Simpan pinjam Koperasi
- 4. Program Pengembangan dan Restrukturasi Usaha
 - (1) Kegiatan Pengembangan Kewirausahaan

Uraian lebih lanjut Program dan Kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2018 dan Perkiraan Maju Tahun 2019

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
2.11.2.11.1.01	I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	100%	740.673.100			100%	812.122.000
2.11.2.11.1.01.01	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	4.500 buah	177.815.000	APBD Kab		4.500 buah	180.060.000
2.11.2.11.1.01.02	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	12 Bulan	66.130.500	APBD Kab		12 Bulan	70.220.000
2.11.2.11.1.01.07	3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	118 OB	50.925.000	APBD Kab		118 OB	57.690.000
2.11.2.11.1.01.08	4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	36 OB	45.600.000	APBD Kab		36 OB	57.215.000
2.11.2.11.1.01.10	5. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	47 Jenis	61.925.000	APBD Kab		47 Jenis	73.980.100
2.11.2.11.1.01.11	6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak yang disediakan (Jenis)	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	14 Jenis	46.653.000	APBD Kab		14 Jenis	57.632.900
2.11.2.11.1.01.12	7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	10 Jenis	8.574.100	APBD Kab		10 Jenis	4.910.000
2.11.2.11.1.01.15	8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	1 Jenis	2.880.000	APBD Kab		1 Jenis	4.510.000

2.11.2.11.1.01.16	9. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	2 Jenis	11.328.000	APBD Kab		2 Jenis	17.540.000
2.11.2.11.1.01.17	10. Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	5197 HOK	105.422.500	APBD Kab		5200 HOK	109.464.000
2.11.2.11.1.01.18	11. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	39 HOK	63.550.000	APBD Kab		40 HOK	68.800.000
2.11.2.11.1.01.19	12. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	275 HOK	99.870.000	APBD Kab		280 HOK	110.100.000
2.11.2.11.1.02	II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	100%	1.190.382.000			100%	505.365.000
2.11.2.11.1.02.05	13. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 Baru yang diadakan (Unit)	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	4 Unit	934.512.000	APBD Kab		1 Unit	225.000.000
		Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 Baru yang diadakan (Unit)	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	3 Unit	75.000.000	APBD Kab		-	-
2.11.2.11.1.02.07	14. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	1 Jenis	30.000.000	APBD Kab		1 Jenis	30.000.000
2.11.2.11.1.02.09	15. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	2 Jenis	19.650.000	APBD Kab		5 Jenis	55.000.000
2.11.2.11.1.02.10	16. Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mebeleur yang diadakan (jenis)	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	-	-	APBD Kab		1 Jenis	30.000.000
2.11.2.11.1.02.22	17. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	25 Jenis	49.915.000	APBD Kab		30 Jenis	68.500.000
2.11.2.11.1.02.24	18. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	24 Unit	66.850.000	APBD Kab		24 Unit	66.110.000
2.11.2.11.1.02.28	19. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	5 Jenis	14.455.000	APBD Kab		5 Jenis	20.755.000

2.11.2.11.1.02.29	20. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah Mebeleur yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	-	-	APBD Kab		1 Jenis	10.000.000
2.11.2.11.1.03.01	III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	100%	27.820.000			100%	35.300.000
2.11.2.11.1.03.01	21. Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah Mesin/Kartu Absensi yang diadakan (unit)	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	-	-	APBD Kab		1 Unit	6.500.000
2.11.2.11.1.03.05	22. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga (Stel)	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	52 Stel	27.820.000	APBD Kab		52 Stel	28.800.000
2.11.2.11.1.05	IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	Kab. Malang	100%	7.200.000			100%	8.000.000
2.11.2.11.1.05.01	23. Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	Kab. Malang	15 Orang	7.200.000	APBD Kab		15 Orang	8.000.000
2.11.2.11.1.06	V. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	Kab. Malang	100%	103.864.000			100%	120.564.000
2.11.2.11.1.06.01	24. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen SAKIP (Buku)	Kab. Malang	1 Buku	75.365.000	APBD Kab		1 Buku	80.365.000
		Jumlah Laporan Tahunan (Buku)	Kab. Malang	1 Buku	8.000.000	APBD Kab		1 Buku	10.000.000
		Jumlah Dokumen Renstra (Buku)	Kab. Malang	1 Buku	7.000.000	APBD Kab		1 Buku	9.000.000
		Jumlah Dokumen Renja (Buku)	Kab. Malang	1 Buku	7.000.000	APBD Kab		1 Buku	9.000.000
		Jumlah Laporan Kinerja SKPD Triwulanan (I s/d III) (Buku)	Kab. Malang	1 Buku	3.000.000	APBD Kab		1 Buku	4.000.000
2.11.2.11.1.06.04	25. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	Kab. Malang	1 Buku	3.499.000	APBD Kab		1 Buku	8.199.000

	VI. Program Peningkatan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro	Presentase Koperasi yang telah dibina kelembagaan dan Pengawasan	Kab. Malang	100%	850.344.050			100%	929.995.100
	26. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Jumlah Peserta bimbingan teknis pengendalian dan pengawasan	Kab. Malang	390 orang	239.616.550	APBD Kab		390 orang	259.267.600
	27. Sosialisasi Prinsip - prinsip Pemahaman Perkoperasian	Jumlah peserta bimbingan teknis perkoperasian dan pengawasan koperasi	Kab. Malang	50 Koperasi	85.000.000	APBD Kab		50 Koperasi	95.000.000
		Jumlah Kelompok Ekonomi Produktif yang diberikan sosialisasi Perkoperasian	Kab. Malang	15 KEP	116.280.000	APBD Kab		15 KEP	126.280.000
		Jumlah Peserta bimbingan teknis perkoperasian dan dasar-dasar akuntansi	Kab. Malang	97 KSPPS	244.200.050	APBD Kab		97 KSPPS	254.200.050
	28. Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	Jumlah Pembinaan Koperasi Berprestasi	Kab. Malang	5 Koperasi	36.180.000	APBD Kab		5 Koperasi	46.180.000
		Jumlah Peserta sosialisasi peningkatan SDM Koperasi	Kab. Malang	35 Koperasi	29.067.450	APBD Kab		35 Koperasi	39.067.450
		Jumlah Peserta Bimbingan teknis Pembinaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas koperasi	Kab. Malang	50 Koperasi	100.000.000	APBD Kab		50 Koperasi	110.000.000
	VII. Program Peningkatan Produksi dan Pemasaran Koperasi dan Usaha Mikro	Persentase Jumlah koperasi yang mendapat akses peningkatan produksi dan pemasaran	Kab. Malang	100%	660.000.000			100%	685.000.000
	29. Penguatan Manajemen Usaha dan daya Saing Produk Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Anggota Koperasi dan Usaha Mikro yang ditingkatkan Manajemen Usaha dan daya saing produknya	Kab. Malang	250 Orang	190.000.000	APBD Kab		250 Orang	195.000.000
	30. Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro melalui Pameran Tingkat Regional dan Nasional	Jumlah Koperasi dan Usaha Mikro yang difasilitasi melalui Promosi dan Pameran tingkat Nasional dan Regional	Kab. Malang	12 Kop	180.000.000	APBD Kab		12 Kop	190.000.000
	31. Pengembangan Inkubator Teknologi dan Bisnis serta diversifikasi Usaha Produk Koperasi	Jumlah Anggota Koperasi yang dikembangkan jenis produknya melalui inkubator bisnis dan teknologi	Kab. Malang	350 Orang	290.000.000	APBD Kab		350 Orang	300.000.000

	VIII. Program Peningkatan Akses Pembiayaan Koperasi dan Usaha Mikro	Persentase Koperasi yang Mendapatkan peningkatan akses pembiayaan	Kab. Malang	100%	508.598.950			100%	533.148.950
	32. Koordinasi dan Penguatan Akses Permodalan Koperasi Serta Jaringan Kerjasama Usaha Simpan Pinjam Antar Koperasi	Jumlah anggota Koperasi yang difasilitasi akses permodalan dan fasilitasi jaringan kerjasama antar koperasi	Kab. Malang	313 Koperasi	207.254.500	APBD Kab		313 Koperasi	212.254.500
	33. Penataan Manajemen Usaha Simpan Pinjam Koperasi	Jumlah Koperasi yang di berikan bimbingan teknis Manajemen Usaha Simpan Pinjam sesuai dengan ketentuan	Kab. Malang	120 Koperasi	100.450.000	APBD Kab		120 Koperasi	110.450.000
	34. Penilaian Kesehatan Koperasi	Jumlah Koperasi yang dinilai kesehatannya	Kab. Malang	135 Koperasi	200.894.450	APBD Kab		135 Koperasi	210.444.450
	IX. Program Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha	Persentase Usaha yang dikembangkan dan direstrukturisasi	Kab. Malang	100%	1.220.432.700			100%	1.260.432.700
	35. Pengembangan Jaringan Kerjasama	Jumlah desa yang di petakan produk unggulan dan Jumlah Fasilitasi Kerjasama dengan lembaga terkait	Kab. Malang	390 Desa / kelurahan dan 5 Kerjasama	90.490.000	APBD Kab		390 Desa / kelurahan dan 5 Kerjasama	95.490.000
	36. Pengembangan Kewirausahaan	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana PLUT-KUMKM	Kab. Malang	11 Jenis	300.000.000	APBD Kab		11 Jenis	300.000.000
		Jumlah Orang yang diberikan Honor untuk mengelola PLUT-KUMKM selama 12 bulan	Kab. Malang	10 Orang	174.000.000	APBD Kab		10 Orang	174.000.000
		Jumlah orang yang difasilitasi melalui pendampingan Pusat Layanan Usaha Terpadu KUMKM	Kab. Malang	200 Orang	150.000.000	APBD Kab		200 Orang	175.000.000
	37. Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro	Jumlah fasilitasi promosi di tingkat Nasional, tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten	Kab. Malang	9 Pameran	505.942.700	APBD Kab		9 Pameran	515.942.700
	X. Program Peningkatan Permodalan Koperasi dan Usaha Mikro	Persentase target pendapatan Asli Daerah melalui Dana bergulir	Kab. Malang	100%	335.000.000			100%	345.000.000
	38. Peningkatan Permodalan KUMKM Melalui UPT Pengelola Dana Bergulir	Jumlah Usaha Mikro, kecil, menengah dan Koperasi yang diberikan pelayanan bantuan pinjamam Dana Bergulir	Kab. Malang	125 KUMKM	335.000.000	APBD Kab		125 KUMKM	345.000.000

	XI. Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Persentase masyarakat yang diberikan pembinaan dan pelatihan ketrampilan	Kab. Malang	100%	1.726.000.000			100%	1.800.000.000
	39. Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat	Jumlah orang yang diberikan pembinaan dan pelatihan ketrampilan	Kab. Malang	2.000 Orang	1.426.000.000	DBHCT		2.000 Orang	1.450.000.000
		Jumlah fasilitasi Promosi produk usaha yang diikuti/diadakan	Kab. Malang	5 event	300.000.000	DBHCT		5 Event	350.000.000
JUMLAH					7.370.314.800	JUMLAH			7.034.927.750

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang ini, merupakan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan diharapkan guna mewujudkan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai prinsip-prinsip Perkoperasian dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pada tahun 2018 Rencana Kerja ini terdapat 11 program dan 39 kegiatan. Jika dalam proses perkembangan pelaksanaan program/kegiatan terjadi perubahan disebabkan adanya kebijakan-kebijakan baru, kebutuhan atau adanya peraturan-peraturan baru, maka dimungkinkan untuk dilakukan perubahan dengan mekanisme diusulkan kembali sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2018 ini disahkan untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan selama satu tahun, dan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Daerah Kabupaten Malang serta mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tahun 2018. Rencana kerja ini sebagai panduan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro tahun 2018 diharapkan manfaat pelaksanaan kegiatan dapat membantu mencukupi kebutuhan sarana dan prasarana koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah di Kabupaten Malang, sehingga berdampak pada kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat Kabupaten Malang serta sebagai penunjang pembangunan daerah.

Demikian untuk dilaksanakan.

**KEPALA DINAS
KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN MALANG**

MADE DEWI ANGGRAENI

LAMPIRAN

1. INDIKATOR KINERJA

Tujuan 1:		
Meningkatkan kualitas kelembagaan dan organisasi Koperasi agar Koperasi mampu dan berkembang secara sehat jati dirinya menjadi wadah kepentingan bersama bagi anggotanya untuk memperoleh efisiensi kolektif, sehingga citra Koperasi menjadi baik		
Sasaran 1.1 :		
Meningkatnya Jumlah Koperasi Aktif	Persentase Koperasi Aktif	$\frac{\sum \text{koperasi Aktif} \times 100\%}{\sum \text{Koperasi}}$
Program 1:		
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Cakupan peningkatan pemahaman tentang pengelolaan koperasi dan pengawas koperasi	\sum koperasi yang diberikan bimbingan Teknis
Tujuan 2:		
Mengembangkan jiwa dan semangat kewirausahaan, dan meningkatkan daya saing UKM, sehingga pengetahuan serta sikap wirausaha semakin berkembang, produktivitas meningkat, wira usaha baru berbasis pengetahuan dan teknologi meningkat jumlahnya, dan ragam produk-produk unggulan UKM semakin berkembang		
Sasaran 2.1 :		
Meningkatnya jumlah usaha mikro kecil dan menengah	Persentase Pertumbuhan UMKM	$\frac{\sum \text{UMKM Tahun (n)} - \sum \text{UMKM Tahun (n-1)} \times 100\%}{\sum \text{UMKMTahun (n-1)}}$
Program 2:		
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM	Cakupan pemenuhan peningkatan promosi produk usaha bagi KUMKM	\sum KUMKM yang difasilitasi promosi
Program 3:		
Program Peningkatan Pelayanan	Cakupan pemenuhan pelayanan bantuan dana bergulir bagi KUMKM	\sum KUMKM yang diberikan bantuan dana bergulir
Program 4:		
Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Cakupan Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah untuk kemudahan pelayanan bagi KUMKM	\sum KUMKM yang diberikan bimbingan teknis
Program 5:		
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM	Cakupan SDM KUMKM dalam pengembangan kewirausahaan dan peningkatan ketrampilan	\sum KUMKM yang diberikan bimbingan teknis